

ANALISIS PENERIMAAN DANA DESA DAN BELANJA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DI KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN

Febrina^{*a}, Khairil Anwar^{*b} Ratna^{*c}

* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

a Corresponding author: afrida@gmail.com

b khairil.anwar@unimal.ac.id

c ratna@unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Keywords: Village Fund Receipt, Village Expenditure, Economic Development.

This study aims to analyze the Effect of Village Fund Receipts and Village Expenditures on Economic Development in Jeumpa District, Bireuen Regency. The data used in this study is secondary data in 32 villages. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of the study partially received village funds, village expenditures had an effect on economic development in Jeumpa District, Bireuen Regency. Simultaneously, village fund receipts and village expenditures have an effect on economic development in Jeumpa District, Bireuen Regency.

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016, Alokasi Dana Gampong merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk gampong paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk gampong secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana gampong adalah bagian keuangan gampong yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk gampong yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi dana untuk desa yang kini disalurkan ke setiap desa harus dapat dipertanggungjawabkan, setelah adanya kebijakan ini desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016.

Tahapan pengelolaan dana Desa berdasarkan permendagri No.113/2014 yakni perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggung jawaban. Setiap komponen pengelolaan dana desa harus didasari atas azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari 5 tahap tersebut ada 3 tahap yang tidak memiliki kendala yang sulit yakni perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Berdasarkan Peraturan UU Dana Desa Pasal 103 paragraf 6 tentang pelaporan dan pertanggung jawaban, menjelaskan bahwa dana desa harus selesai enam bulan sekali dalam setahun, yakni untuk tahap 1 di kumpulkan pada bulan Juni dan tahap kedua pada bulan Desember dengan batas penyampaian laporan dana desa paling lambat 1 (satu) bulan.

Selain penerimaan dana desa, belanja desa juga menjadi salah satu unsur yang dapat menggerakkan pengembangan ekonomi dalam suatu desa. Dengan adanya sejumlah belanja yang di anggarkan maka pengembangan ekonomi akan semakin baik. Pengembangan ekonomi yang semakin baik dapat dilihat dari pembangunan dalam suatu desa yang berkembang baik seperti pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

Fenomena rendahnya pengembangan ekonomi di desa yang ada di Kabupaten Bireuen masih belum merata, seperti akses jalan masih belum memadai,

sebagian akses jalan di dusun ini masih berupa jalan berbatu belum diaspal, dan untuk jalan yang sudah mendapat aspal juga sudah mengalami kerusakan. Selain itu akses air bersih juga masih sulit untuk kehidupan sehari-harinya masyarakat mengandalkan sumur yang ada di dusun tersebut dengan mengambil air secara langsung karena tidak memiliki pipa penyaluran air. Pembangunan masih sangat kurang, Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Fenomena menarik yaitu Gampong Beurawang yang memiliki jumlah penerimaan desa sebesar Rp. 619,804,985 namun pengembangan ekonomi di Desa tersebut sebesar Rp. 133,098,500 Sementara pada Desa Blang Baroh memiliki penerimaan desa lebih besar yaitu Rp. 769,421,625 akan tetapi pengembangan ekonomi pada desa tersebut justru lebih rendah yaitu Rp. 132,632,500.

Setiap desa dimana otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengelola desa secara mandiri. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap desa untuk saling berlomba-lomba dalam mendapatkan pendapatan desa dengan berbagai pengolahan sumber potensi sumber daya yang dimiliki. Semakin baik sumber daya manusia maka akan semakin besar pula manfaat yang akan di peroleh untuk suatu desa. Apabila desa mampu mendapatkan Pendapatan ekonomi yang besar maka setiap pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan akan lebih mudah untuk di bangun. Namun yang terjadi justru banyak desa yang kurang memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pembangunan dalam suatu desa tergantung dari penerimaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembangunan

Suryana (2000), pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat

desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Sukirno (2016), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Di sini ada dua aspek penting yang saling berhubungan erat yaitu pendapatan total atau yang lebih dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk

Schumpeter (2006) pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan gradual, tetapi merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi terjadi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dan selalu mengarah positif untuk perbaikan segala sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Industri dan perdagangan akan mewujudkan segala kreatifitas dalam pembangunan ekonomi dengan penggunaan teknologi industri serta dengan adanya perdagangan tercipta kompetisi ekonomi

Todaro (2008) Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan (disparitas) dan pengangguran.

Arsyad (2010), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses. Proses yang dimaksud adalah proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru

Penerimaan dana Desa

Ringo (2017) juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yaitu segala aktivitas yang di laksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan dana yang di alokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di terima.

Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Jadi, Pengelolaan dana desa adalah segala aktivitas yang di kelola oleh desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Menurut Bungaran Antonius Simanjutak (2013) pembangunan desa merupakan tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa), selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 90 Tahun 2015 bahwa pemberian kewenangan kepada desa dalam mengelola dana desa dimaksudkan dengan tujuan: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan; 2. Mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya; 3. Untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi pada masyarakat desa.

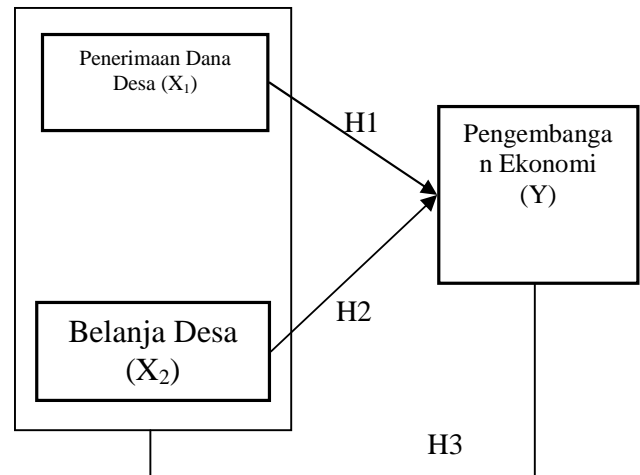
Prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa menurut Mardiasmo (2002) adalah prinsip transparansi atau keterbukaan yang diartikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa.

Belanja Desa

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Kerangka Konseptual

Adapun kertiingkat konseptual dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Penerimaan Dana Desa berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pengembangan Ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- H₂ : Belanja Desa berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pengembangan Ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- H₃ : Penerimaan Dana Desa dan Belanja Desa berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pengembangan Ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

3. TEKNIK PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu didapatkan dari Kecamatan Jeumpa.

Definisi Operasional Variabel

1. Penerimaan Dana Desa (X₁) yaitu jumlah dana yang diterima pemerintahan desa yang bersumber dari pendapatan desa serta dana pemerintah yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

2. Belanja Desa (X2) yaitu jumlah penggunaan dana desa di Kabupaten Jeumpa yang digunakan untuk menunjang pembangunan ekonomi yang diukur dalam satuan Rupiah (Rp)
3. Pengembangan Ekonomi (Y) yaitu suatu alat ukur yang melihat pertumbuhan penduduk yang diimbangi oleh meningkatnya teknologi yang digunakan serta peningkatan kesejahteraan, yang diukur dalam satuan Rupiah (Rp)

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan guna menguji apakah di dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu terdistribusi normal. Apabila terdapat normalitas, maka residual terdistribusi normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi simetri di sekitar nilai means sama juga dengan nol. Untuk uji normalitas data, untuk melihat normalitas residual peneliti melihat dengan Jarque-Bera.

Winarno, (2013) normalitas dapat dideteksi dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* dengan tingkat *alpha* 0,05, data dapat dikatakan residual berdistribusi normal apabila probabilitas > 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lain. Uji multikolinieritas adalah salah satu pengujian di dalam asumsi klasik yang berguna untuk melihat apakah variabel-variabel independen di dalam penelitian memiliki hubungan atau tidak. (Gujarati, 2012) mengatakan bahwa model regresi linear berganda yang baik tidak memiliki hubungan di antara variabel-variabel bebasnya.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yaitu uji prasyarat yang harus di penuhi pada model regresi berganda dengan ketentuan apabila penelitian umumnya menggunakan data time series atau menggunakan periode. Tujuan daripada uji ini yaitu melihat kesalahan yang akan terjadi antar tahun penelitian. Suatu penelitian dikatakan terbebas dari autokorelasi atau bebas dari kesalahan yang muncul antar tahun yaitu apabila nilai obsevasi pada R Square lebih kecil dari chi square dan nilai probabilitasnya lebih besar dari signifikan 5 %, Gujarati, (2012).

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan apabila dalam sebuah penelitian memiliki pengamatan yang lebih dari pada satu, dengan tujuan yaitu untuk melihat kesalahan antar pengamatan yang akan terjadi. Suatu penelitian dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas atau bebas dari kesalahan yang muncul antar tahun yaitu apabila nilai obsevasi pada R Square lebih kecil dari chi square dan nilai probabilitasnya lebih besar dari signifikan 5 %, Gujarati, (2012).

Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode regresi linier berganda untuk analisis pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk menentukan variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Model yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_1 + \beta_2 \text{Log } X_2 + e$$

Dimana :

Y	= Pengembangan Ekonomi
β_0	= Konstanta
X1	= Penerimaan Dana Desa
X2	= Belanja Desa
B	= Koefisien Regresi Variabel
E	= <i>error term</i>

Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variable dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian hipotesis. Untuk melakukan keputusan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka perlu dilakukan pengujian secara statistik.

Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5%, dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Bila $f_{hitung} > f_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen

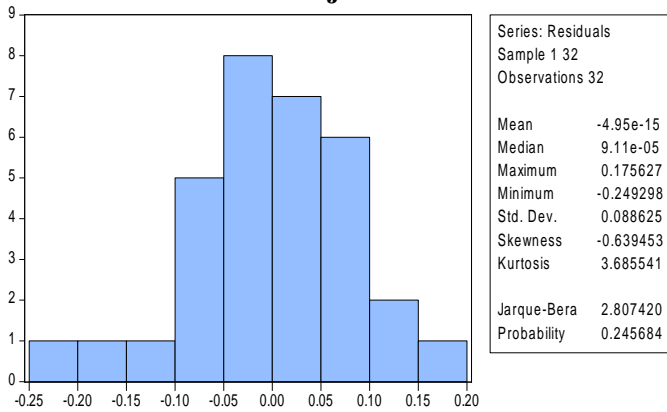
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan guna menguji apakah di dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu terdistribusi normal.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Eviews, data diolah (2021)

Berdasarkan Gambar di atas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dibuktikan melalui perbandingan nilai *Jarque Bera* $chi-square$ yaitu $2,80 < 5,99$, dan juga bisa dibuktikan melalui Probabilitas *Jarque Bera* > 0,05 yaitu sebesar $0,245 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Winarno (2013), yang menyatakan bahwa data terdistribusi normal apabila nilai *Jarque Bera* $chi-squared$ dan Probabilitas *Jarque Bera* > 0,05.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lain.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Pengembangan_Ekonomi	Belanja_Desa	Penerimaan_Dana_Desa
Pengembangan_Ekonomi	1.000000		

Belanja_Desa	0.769087	1.000000	
	6.590781	----	
	0.0000	----	
Penerimaan_Dana_Desa	0.737866	0.693574	1.000000
	5.987822	5.273369	----
	0.0000	0.0000	----

Sumber : Hasil eviews, 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian dimana nilai korelasi lebih kecil dari 0.8.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu adanya hubungan antara kesalahan pengganggu yang muncul pada data runtun waktu (*time series*).

Tabel 2
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.158330	Prob. F(2,26)	0.1358
Obs*R-squared	4.413957	Prob. Chi-Square(2)	0.1100

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi kesalahan pengganggu antar runtun waktu (*time series*) dalam penelitian, hal ini dibuktikan oleh hasil statistic *Obs * R-squared* lebih kecil dari *Chi Square* yaitu $4,41 < 5,99$. Hal ini juga dapat dilihat dari *Probabilitas Chi Square* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,110.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji white.

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.407495	Prob. F(2,29)	0.2610
Obs*R-squared	2.831360	Prob. Chi-Square(2)	0.2428
Scaled explained SS	3.122431	Prob. Chi-Square(2)	0.2099

Sumber : Data diolah, (2019)

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesalahan pengganggu antar pengamatan dalam penelitian atau tidak adanya heteroskedastisitas dimana Observasi *R*square* < *Chi Square* atau $2,83 < 5,99$ dan probabilitas *Chi-Squared* sebesar 0,209 lebih besar dari 0,05.

Analisa Regresi Linier Berganda

Uji regresi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel penerimaan dana desa dan belanja desa terhadap variabel dependen pengembangan ekonomi . Berdasarkan dari hasil Uji analisis regresi linier berganda

dengan alat bantu komputer yang menggunakan program Eviesw 9, dapat dilihat pada Tabel 4, sebagai berikut

Tabel 4
Hasil Analisa Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Pengembangan Ekonomi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.893934	5.881587	-1.682188	0.1033
Log(Dana Desa)	1.061516	0.400781	2.648618	0.0129
Log(Belanja Desa)	0.496788	0.145524	3.413799	0.0019
R-squared	0.667303	Durbin-Watson stat		0.861002
Adjusted R-squared	0.644358			
F-statistic	29.08315			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : EvIEWS 8, data diolah (2021)

Dari tabel 4 di atas maka model regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = -9.893934 + 1.061516 \text{ Log}X_1 + 0.496788 \text{ Log}X_2$$

Dari hasil diatas dapat diinterpretasi hasil analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

Constanta sebesar -9,893934 menunjukkan apabila penerimaan dana desa (X_1), dan belanja desa (X_2) bernilai konstant maka pengembangan ekonomi (Y) menurun sebesar 9,893934%. Koefisien variabel penerimaan dana desa (X_1) mempunyai nilai sebesar 1.061516, Hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Artinya apabila penerimaan dana desa (X_1) meningkat 1 % maka pengembangan ekonomi (Y) akan meningkat sebesar 1.061516% dengan asumsi belanja desa konstan. Koefisien variabel belanja desa (X_2) mempunyai nilai sebesar 0,496788, Hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Artinya apabila belanja desa (X_2) meningkat 1 % maka pengembangan ekonomi (Y) akan meningkat sebesar 0,496788 % dengan asumsi penerimaan dana desa konstan.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa :

1. Penerimaan dana desa (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi di Kecamatan Jeumpa kabupaten Bireuen. Secara statistik nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2,648 > 1,697$ dan nilai probabilitas sebesar $0,01 < 0,05$. Maka berdasarkan pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa terima H_1 .
2. Belanja Desa (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi di

Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Secara statistik nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $3,413 > 1,696$ dan nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$. Maka berdasarkan pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa terima H_2

Hasil Uji F

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 29,083 dengan probabilitas sebesar 0,000, sedangkan f_{tabel} pada $df = (k-1) (n-k) = (3-1) (32-2) = 2) (30)$ yaitu sebesar 3,630 dari $\alpha = 1\%$, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $29,083 > 3,630$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima artinya secara simultan penerimaan dana desa dan belanja desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen (Y).

Koefisien Determinasi (R^2) dan Korelasi (R)

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji Koefisien determinasi R^2 dengan regresi linier berganda, maka yang di lihat dari *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,6443 atau 64,43 %. Jadi besarnya pengaruh variabel penerimaan dana desa dan belanja desa terhadap pengembangan ekonomi adalah sebesar 64,43 %. Sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain diluar model sebesar 35,57.

Koefisien Korelasi (R)

Koefisien Korelasi (R) dapat diperoleh dari $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0,6443} = 0,8026$

Jadi hubungan antara penerimaan dana desa dan belanja desa terhadap pengembangan ekonomi berpengaruh kuat secara positif, karena nilai korelasi sebesar 80,26 Persen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerimaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dana desa berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat penerimaan dana desa maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Penerimaan dana desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan hampir pada setiap desa, sehingga kondisi ini dapat mendorong pembangunan di Kecamatan Jeumpa yang lebih baik seperti adanya pembangunan sarana dan prasarana

desa, serta banyak pula pengembangan-pengembangan ekonomi yang sudah berkembang di setiap desa. Pengembangan ekonomi juga terlihat dari antusias dari masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha-usaha desa atau yang di sebut BUMG (badan Usaha Milik Gampong), dimana pendapatannya akan meningkatkan pendapatan desa yang akan di gunakan untuk pengembangan desa yang lebih baik. Dengan adanya dana desa dapat diharapkan mampu mengubah desa untuk kedepanya menjadi lebih baik dan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengembangan ekonomi pada desa yang memiliki penerimaan desa lebih tinggi di bandingkan dengan desa yang memiliki penerimaan dana desa lebih rendah. Dengan adanya penerimaan dana desa banyak aspek yang dapat di kembangkan oleh setiap desa seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih untuk masyarakat serta adanya pelatihan pelatihan yang diberikan kepada para pengusaha rumahan untuk dapat lebih siap dalam mengembangkan ekonomi rumah tangga.

Pada tahun 2019 salah satu desa dikecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yaitu Desa Seuneubok Lhong memiliki BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) bersumber dari dana desa yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat serta menguntungkan bagi desa itu sendiri.

Prioritas BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) di desa Seuneubok Lhong ini pada sektor Peternakan Kambing dan Jual Beli Hasil Bumi. Dana yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUMG tahun 2019 sebesar Rp 343.000.000 dengan unit usaha meliputi perternakan kambing Rp 100.000.000 dan unit usaha jual beli hasil bumi sebesar Rp 30.000.000. Dalam pengelolaan unit usaha Perternakan Kambing , pengelola merawat dan memberi asupan untuk penggemukan kambing dan kemudian akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibeli. Sedangkan dalam pengelolaan unit usaha jual beli hasil bumi, BUMG akan menampung hasil bumi masyarakat desa seuneubok Lhong dengan harga yang sama dengan harga pada umumnya hanya saja masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transport untuk menjual hasil bumi. Dengan adanya BUMG di desa tersebut masyarakat dengan mudah menjual hasil bumi tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Dari hasil BUMG tersebut desa seuneubok Lhong mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.300.000 pada tahun 2019. Keuntungan yang didapatkan dari BUMG desa Seuneubok Lhong digunakan untuk meningkatkan pengembangan BUMG itu sendiri, dan akan dibagi sesuai presentase yang ditentukan

sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat desa seuneubok Lhong.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukna oleh Alam dan Uliwiya (2018) yang menyimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan ekonomi.

Pengaruh Belanja Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dapat mengalokasikan sejumlah belanja desa dan menggunakan anggaran belanja desa dengan efektif dan efisien. Salah satu unsur belanja desa yaitu membayar sejumlah gaji aparatur desa, hal ini tentunya akan berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat.

Semakin besar belanja desa menunjukkan bahwa banyak kegiatan yang harus diselesaikan oleh setiap desa dalam rangka menggunakan anggaran dengan bijak. Penggunaan belanja dengan baik tentunya akan memberikan hasil yang lebih baik pula sehingga akan meningkatkan berbagai aspek ekonomi yang dilakukan dan dikembangkan oleh desa yang ada di Kecamatan Jeumpa.

Belanja desa pada Kecamatan Jeumpa di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja desa maka akan semakin meningkat pengembangan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya belanja desa maka seluruh kegiatan desa yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik.

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pada tahun 2018 salah satu desa dikecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yaitu desa Pulo Lawang mengalami kerusakan akses jalan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Pada tahun 2019 telah diberi anggaran belanja desa yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti Rehabilitasi Jalan utama, rehabilitasi jalan lorong, rehabilitasi drainase dengan alokasi dana sebesar Rp.

329.693.000 . Dengan adanya anggaran dana desa yang diberikan untuk belanja desa, maka terealisasinya infrastruktur diatas. Dimana sekarang masyarakat di desa Pulo Lawangsudah sangat mudah mengakses jalan untuk mencari pendapatansehinggameningkatkan perekonomian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial penerimaan dana desa berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat penerimaan dana desa maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat sehingga pengembangan ekonomi akan meningkat pula
2. Secara parsial belanja desa berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja desa digunakan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan aspek ekonomi pada kecamatan Jeumpa.
3. Secara simultan penerimaan dana desa dan belanja desa berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Peningkatan sejumlah penerimaan dana desa tentunya akan memberikan sedikit kemandirian bagi Kecamatan Jeumpa dalam mengelola daerah sehingga akan mengurangi transfer dari pemerintah Kabupaten, penerimaan dana desa yang besar dapat di alokasikan untuk belanja desa dalam membangun perekonomian desa.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat, diharapkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat menyediakan data setiap desa yang lebih baik dan lebih valid, sehingga dapat meningkatkan dan

mempbandingkan kualitas pengelolaan anggaran pada setiap desa yang ada dan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penentuan anggaran untuk tahun yang akan datang dan juga Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat menstimulasi setiap desa untuk lebih baik dalam mengelola anggaran belanja dan juga meningkatkan penerimaan dari Badan usaha Milik Gampong sehingga setiap desa bisa lebih mandiri.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meningkatkan aspek lain atau variabel lain yang dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi serta dapat menggunakan metode yang berbeda dalam menganalisis pengembangan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad*, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Alam dan Uliwiya (2018) pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pembangunan perdesaan (Studi Kasus Di Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang).
- Baldwin*, J.R. dan *Dixon*, J., 2008, "Infrastructure Capital: What is it? Where is it? How Much of it is There?", Canadian Productivity Review Research
- Darise*, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks
- Effendi, Bachtiar. (2002). Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: UHaindo dan Offset
- Harahap, S.S (2012). Teori Akuntansi, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ismail, M., Widagdo A. Kuncoro dan Widodo, A. (2016). Sistem Pengelolaan Dana Desa Vol XIX Nomor 2 Hal.323-339
- Jamaluddin dan Buchari (2018) Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah

- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM. YKPN*
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta*
- Mardiasmo. (2002). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan*
- Muslihah, Siregar dan Srinati (2019) Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Mankiw N,Gregory, dkk. 2003. Teori Makroekonomi. Jakarta: Erlanga*
- Nurmadimah, F., 2012. Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UP dengan Skema KPS.. Universitas Indonesia*
- Nurcholis, H. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA*
- Ringo, E, S.,Yuswanto., Marlia, E, P. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Vol 4 Nomor 2 Hal 1-14*
- Rohmah (2016) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban*
- Sofianto (2017) Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan*
- Sukirno, Sadono. 2016. Teori Pengantar Makro Ekonomi Edisi Ketiga. Rajawali Pers: Jakarta*
- Siagian, Sondang., P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara*
- Sugiyono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.*
- Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan, Problematika, dan Pendekatan. Jakarta : Salemba Empat*
- Schumpeter, J. A., 2006. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York: McGraw-Hill*
- Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga,Jakarta.*